

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik¹ kemampuan untuk memilih tujuan atau indikator yang tepat dan mencapai tujuan bisa disebut sebagai efektivitas. Oleh sebab itu, efektivitas mengacu pada kaitan antara output atau tujuan dan hasil yang telah diinginkan. Efektifnya suatu organisasi bisa dilihat jika output yang telah dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks pencapaian tujuan, efektivitas berarti melakukan hal yang benar atau menyelesaikan tugas yang tepat. Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk berhasil mencapai tujuan organisasi, sehingga efektivitas digambarkan sebagai ukuran apakah manajer melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Efektivitas juga bisa didefinisikan sebagai sejauh mana organisasi mencapai tujuannya.²

b. Pengukuran efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang telah dilakukan oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur dengan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika sebuah organisasi bisa mencapai tujuannya, maka

¹ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 129.

² Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 416.

organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Yang terpenting yaitu efektifitas tidak menunjukkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya mempertimbangkan apakah proses program atau kegiatan program tersebut telah mencapai tujuan yang ditentukan.

Untuk itu perlu diketahui ukuran efektivitas, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi :

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian yaitu keseluruhan upaya untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya tujuan akhir, perlu dilakukan penyesuaian bertahap, baik dalam arti bertahap pencapaian bagian itu maupun penyesuaian bertahap dalam arti periodisasi. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu ukuran kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan berkomunikasi dengan organisasi yang lain.

3. Adaptasi

Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian tenaga kerja.³

³ Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), 46.

c. Faktor yang mempengaruhi efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Richard

M. Steers yaitu sebagai berikut:

1. Karakteristik organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi dan dapat mempengaruhi aspek efektivitas tertentu dengan cara yang berbeda. Struktur dipahami sebagai hubungan yang relatif tepat yang ditemukan dalam suatu organisasi sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur mencakup bagaimana organisasi menugaskan karyawan untuk bekerja. Sedangkan, teknologi mengacu pada mekanisme organisasi yang mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output).

2. Karakteristik lingkungan

Aspek lingkungan eksternal dan internal juga mempengaruhi efektivitas kerja. Lingkungan itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah semua kekuatan yang terjadi di luar organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku di dalam organisasi. Secara umum, tingkat stabilitas relatif lingkungan, tingkat kompleksitas lingkungan, dan tingkat ketidakstabilan lingkungan dianggap sebagai efek dari faktor-faktor tersebut pada dinamika organisasi. Lingkungan internal yang biasa disebut dengan iklim organisasi mencakup berbagai atribut lingkungan kerja yang

berhubungan dengan aspek efektivitas tertentu, terutama yang diukur pada tingkat individu.

3. Karakteristik pekerja

Perilaku pekerja memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan perusahaan, karena pekerja adalah sumber daya yang berhubungan langsung dengan pengelolaan semua sumber daya yang tersedia dalam organisasi. Pekerja adalah modal terpenting dari suatu organisasi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitasnya, karena teknologi yang digunakan adalah teknologi yang sangat maju, didukung oleh struktur yang baik, tetapi tidak berguna tanpanya.

4. Kebijaksanaan dan praktik manajemen

Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Sudah menjadi tanggung jawab dari para pemimpin untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya. Peranan pemimpin ini mungkin merupakan fungsi yang paling penting. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumit dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin

penting artinya.⁴

B. Pembiayaan kelompok

Pembiayaan kelompok yaitu terdiri dari dua kata , pembiayaan dan kelompok. Suatu produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu pembiayaan. Sedangkan kumpulan beberapa orang menjadi satu yaitu disebut kelompok.⁵. Pembiayaan kelompok yang dimaksud disini mengacu pada pemberian dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat. Dalam kelompok ini dana diberikan langsung kepada kelompok yang telah terdaftar sebagai anggota pembiayaan, dan mereka wajib mengembalikan pinjaman modal dalam waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

⁴ Ibid, 46.

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 92.

Dari kutipan ayat Al-Qur'an di atas, digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.⁶

C. Tanggung Renteng

a. Pengertian Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung yaitu memikul, menjamin, serta bersedia buat membayar utang orang lain apabila orang tersebut tidak bisa menepati janjinya. Sebaliknya kata renteng yaitu rangkaian, untaian. Tanggung renteng didefinisikan selaku tanggung jawab bersama seluruh anggota kelompok kepada koperasi yang dilandasi oleh keterbukaan serta rasa saling percaya.⁷

b. Unsur-Unsur Dalam Tanggung Renteng

1. Kelompok

Kelompok yang dimaksud disini yaitu bukan hanya daftar anggota yang akan dikelompokkan nanti. Namun, anggota yang mengambil inisiatif akan menggolongkan dirinya sendiri. Idealnya dibentuk berdasarkan keakraban dari setiap anggota, artinya anggota sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain. Keberadaan kelompok ini dibuktikan melalui kegiatan pertemuan kelompok yang rutin dan konsisten.

⁶ Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 101.

⁷ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

2. Kewajiban

Maksudnya yaitu setiap anggota wajib membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan pinjaman angsuran yang diberikan oleh koperasi. Dimana pembayaran semua kewajiban sebagai kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok.

3. Peraturan

layaknya koperasi yang lainnya, dalam hal ini setiap anggota harus tunduk pada aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh setiap kelompok.⁸

c. Nilai Dan Konsep Tanggung Renteng

Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng:

1. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
3. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
4. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan dikalangan anggota.

Manfaat sistem tanggung renteng yaitu untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol sosial yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif jika diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan

⁸ Ibid, 34.

ikatan kepentingan yang kuat. Tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
- b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
- c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya.
- d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan.
- e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- f. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
- g. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.
- h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.⁹

⁹ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal Iqtisadiah, Vol. 6, No. 2 (September 2013) STAI Bhakti Persada Bandung, 387.

d. Syarat Dan Ketentuan Sistem Tanggung Renteng

Untuk mengimplementasikan persyaratan sistem tanggung renteng, anggota harus diwajibkan berkelompok. Kegiatan berkelompok juga menjadi dasar pengelolaan koperasi dengan sistem tanggung renteng. Ada 2 cara untuk menjadi anggota koperasi yang menerapkan sistem tanggung renteng ini yaitu cara yang pertama, bergabung dengan kelompok yang sudah ada dan yang kedua yaitu dengan cara membentuk kelompok baru dengan syarat beranggotakan minimal 10 anggota.

Jumlah minimal anggota didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab masing-masing anggota. Dengan asumsi bahwa semakin kecil jumlah anggotanya, semakin berat beban ketika terjadi tanggung renteng.¹⁰ Walaupun pada sistem tanggung renteng ini semua yang ada kaitannya dengan masalah kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Tetapi disetiap kelompok perlu juga adanya seorang penanggung jawab (PJ) untuk mengkoordinasikan kegiatan kelompok. Oleh saat itu, saat membentuk kelompok, yang pertama dilakukan yaitu memilih penanggung jawab kelompok (PJ). Dalam pemilihan ini pun hak sepenuhnya berada di anggota untuk menentukan siapa diantara mereka yang akan menjadi penanggung jawab (PJ).

D. Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan dapat diartikan tujuan dan suatu proses. Proses

¹⁰ Ibid,49.

pemberdayaan yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ataupun pemberdayaan kelompok yang kurang beruntung dimasyarakat. Sedangkan sebagai tujuan yaitu pemberdayaan mengacu di lingkungan ataupun hasil dari perubahan sosial.¹¹

Jadi pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupa untuk mengembangkannya.¹²

Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraannya, dan memiliki potensi dalam proses pembangunan nasional. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-taubah 105).

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa ayat tersebut merupakan ancaman dari Allah SWT terhadap orang-orang yang menyalahi perintahnya. Amal mereka akan ditampilkan kepada Allah SWT kepada Rasulullah dan kaum mu'minin. jika dikaitkan dengan pemberdayaan

¹¹ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 59.

¹² Mubyartanto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263.

ekonomi adalah Allah memberikan manusia anugrah berupa sumber penghidupan dan al'hikmah yaitu kepahaman dan kecerdasan sehingga manusia tetap betawakal dan bersyukur kepada Allah SWT.

b. Tahapan-tahapan pemberdayaan

Menurut Soekanto, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu sebagai berikut:¹³

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama, penyimpanan petugas dan kedua, penyiapan lapangan.

2. Tahap pengkajian (*assesment*)

Artinya proses evaluasi dapat dilakukan secara individual untuk setiap kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, petugas harus berusaha untuk mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya klien.

3. Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan.

Pada tahap ini otoritas melibatkan warga sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif untuk memikirkan masalah dan cara menghadapinya. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyusun beberapa alternatif program dan kegiatan yang layak.

4. Tahap pemformalisasi rencana aksi.

Pada tahapan ini agen perubahan membantu setiap kelompok

¹³ Soekanto, S.. *Sosial Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali press. 1987). 143.

mengembangkan dan menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Selain itu, perwakilan dapat membantu mengembangkan ide secara tertulis, terutama saat mengajukan proposal kepada penyandang dana

5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.

Untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai pelaksana diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang dikembangkan. Pada tahap ini, kerjasama antara pejabat dan masyarakat menjadi penting, dan hal-hal yang direncanakan dengan baik bisa saja terjadi di lapangan.

6. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pemantauan oleh warga dan staf terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan harus dilakukan dengan partisipasi warga. Dengan partisipasi warga ini diharapkan dalam jangka pendek secara umum akan membentuk sistem komunitas untuk pemantauan internal dan dalam jangka panjang dimungkinkan untuk menjalin komunikasi komunitas yang lebih mapan dengan menggunakan sumber daya yang ada.

7. Tahap terminasi

Tahap terminasi yaitu tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahapan ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

c. Indikator pemberdayaan masyarakat

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan 8 indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Kedelapan indikator tersebut adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Kebebasan mobilitas

Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, tempat hiburan, dll. Tingkat mobilitas ini di anggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan individu maupun keluarga sehari-hari. Seorang dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.

3. Kemampuannya membeli komoditas besar

Kemampuan individu membeli komoditas atau barang- barang sekunder atau tersier, seperti TV, berlangganan koran dll.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga

Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama pasangan mengenai keputusan-keputusan keluarga.

5. Kebebasan relatif dari komoditas keluarga.

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 64- 66.

6. Kesadaran hukum dan politik

Mengetahui nama salah seorang anggota DPRD setempat, mengetahui pentingnya memiliki akta nikah.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat.

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki rumah, tanah, aset produktif

d. Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk mendukung keterjaminan, kesempatan dan keberdayaan melalui:

1. Pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial.
2. Penguatan akuntabilitas dan inklusifitas kelompok-kelompok masyarakat.
3. Peningkatan partisipasi berbasis luas.
4. Perluasan akses masyarakat terhadap informasi dan jaringan sosial.
5. Penyempurnaan pemerintah, lembaga dan kebijakan pada skala sosial dan nasional sehingga responsive terhadap kebutuhan masyarakat lokal.